



**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN UPAYA PENCEGAHAN
KECELAKAAN KERJA**

Oleh :

S O N H A J I, SH.MS.

Naskah disampaikan sebagai bahan diskusi Bagian Hukum
Administrasi Negara tanggal 4 Juli 1995

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1995**

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA

I. Pendahuluan

Perlindungan tenaga kerja merupakan masalah yang sangat penting bagi kepentingan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja yang dilakukan dengan baik akan meningkatkan produktifitas dan efisiensi kerja. Masalah lain yang sangat vital bagi kepentingan tenaga kerja adalah kecelakaan kerja. Kecelakaan yang timbul menimpa tenaga kerja dalam hubungan kerja tidak hanya berakibat kerugian dari segi ekonomi dan sosial saja, namun juga menghambat produktifitas kerja dan mengakibatkan tidak efisiensinya kerja.

Dilihat dari pihak tenaga kerja sendiri, kecelakaan kerja mengakibatkan dirinya tidak masuk kerja karena sakit, mungkin juga ia memperoleh cacat tubuh dan mental. Lebih dari itu sejumlah jiwa yakni anak-anak dan istrinya akan kehilangan tempat tumpuan. Masa depannya hilang. Hal ini merupakan dampak sosial yang tragis.

Dari segi perusahaan, kecelakaan kerja akan berakibat perusahaan mengeluarkan biaya langsung yang dapat berujud biaya pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan ke rumah tenaga kerja atau ke rumah sakit, biaya perawatan medis dan biaya penguburan bila tenaga kerja sampai meninggal dunia.

Biaya langsung tersebut akan disertai dengan biaya tidak langsung seperti kerusakan pada alat alat produksi yang harus diperbaiki, upah kerja yang tetap harus dibayarkan pada mereka yang berhenti kerja karena ikut menolong si penderita kecelakaan. Demikian pula upah kerja tetap dibayarkan pada mereka yang hanya melihat-lihat saja sambil siap untuk menolong, atau bagi mereka yang menjadi asyik membicarakan terjadinya kecelakaan.

Akibat meninggalnya rekan sekerja dalam kecelakaan kerja dapat pula mencekam semangat kerja tenaga lainnya, hingga menyebabkan turunnya produktifitas.

Para pengawas dan staf di perusahaan perlu memberi waktu ekstra untuk keperluan penyelidikan, persiapan, pelaporan, pencatatan serta pembahasan tentang kejadian kecelakaan tadi. Penggantian tenagapun berarti bertambahnya pengeluaran. Hal-halterg sebut di atas memungkinkan tidak tercapainya target produksi pada waktunya. Akibat yang lebih parah lagi adalah apabila kecelakaan menyebabkan terputusnya order atau kontrak.

Menurut statistik dari pengalaman yang lama dari negara-negara pelopor industri yang telah maju, biaya yang tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan dapat menjumlah sebesar 400 % dari biaya langsung untuk suatu kecelakaan kerja.¹⁾

Berdasar atas fakta-fakta tersebut di atas, maka keselamatan dari tiap tenaga kerja di tempat kerja harus menjadi tanggung jawab dari pengusaha.

Hukum Perburuhan di Indonesia mewajibkan terselenggara -nya manajemen keselamatan yang tuntas di tempat kerja. Beberapa kewajiban serta pedoman untuk keperluan itu termuat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970. Kewajiban tersebut antara lain

"Seorang pengusaha/pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan kepada tiap tenaga kerja mengenai sistem dan pengendalian keselamatan kerja, sehubungan dengan pelaksanaan tugas bawahannya untuk memulai kerja, setelah pengusaha yakin bahwa bawahannya telah memahami syarat-syarat keselamatan kerjanya".

"Pengusaha diwajibkan menyelenggarakan latihan-latihan bagi semua bawahannya. Hal ini mencakup pencegahan kecelakaan pemberian asan kebakaran, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja dan pemberian pertolongan pertama."

"Pengusaha diwajibkan memasang poster-poster alat keselamatan kerja, diwajibkan menyediakan alat-alat perlindungan kerja berikut instruksi tentang cara pemakaiannya..." dst

1) Kompas, 20 Agustus 1988

Dalam hal ini pengusaha harus mempunyai sikap bahwa ia menjalankan kewajiban-kewajiban tadi bukan hanya karena kewajiban-kewajiban tersebut diatur oleh peraturan perundangan, atau karena tiap kecelakaan kerja akan merugikan efisiensi dan efektivitas, biaya produksi, output produksi.

Pengusaha mempunyai tugas untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memasyarakatkan sikap sadar akan pentingnya keselamatan kerja bagi tiap tenaga kerja di perusahaannya. Dari sikap tersebut, lambat laun akan menjauhkan mereka dari hal-hal yang akan mengundang mereka terjadinya kecelakaan, sehingga pada akhirnya tenaga kerja akan terlindung dan aman dalam menjalankan pekerjaannya dan sebaliknya pengusaha juga dapat memperoleh hasil seperti yang diharapkan.

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak terduga karena kecelakaan tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Kejadian terjadi secara mendadak, datang dari luar tubuh manusia dan mengganggu kesehatan orang yang ditimpanya. Tidak diharapkan oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material atau penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat.

Pada dasarnya kecelakaan merupakan masalah yang bisa dihindari dan dicegah. Dalam praktek ternyata 85% dari sebab-sebab kecelakaan kerja ditimbulkan oleh faktor manusia.²⁾

Mengingat hal tersebut di atas, ingin diketahui sampai sejauh mana Pemerintah memberi perlindungan terhadap tenaga kerja yang mendapat kecelakaan kerja dalam hubungan kerja dan bagaimana upaya pencegahan kecelakaan kerja tersebut.

II. Pembahasan

a. Pemberian Perlindungan Dari Pemerintah.

Salah satu usaha dari Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan mengeluarkan peraturan tentang ganti kerugian kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan

2) Suma'mur, Dr, M.Sc.; Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan; Gunung Agung, Jakarta, 1981, hal 27.

kaan kerja. Asas yang digunakan untuk memberi ganti rugi pada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan kerja tersebut adalah adanya resiko sosial yang dapat dialami tenaga kerja setiap saat. Setiap tenaga kerja yang mendapat kecelakaan kerja dapat memperoleh ganti rugi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Kecelakaan harus benar-benar terjadi.
2. Kecelakaan tersebut menimpa tenaga kerja.
3. Kecelakaan tersebut terjadi dalam hubungan kerja.
4. Kecelakaan tersebut terjadi di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan.

Empat faktor tersebut harus ada semua dalam kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan yang tidak menimpa tenaga kerja tidak akan diberi ganti rugi. Demikian juga ganti rugi tidak akan diberikan bila tenaga kerja tidak bekerja pada perusahaan yang diwajibkan membayar tunjangan.

Pemerintah memberikan ketentuan tentang macam dan besarnya ganti rugi yang harus diberikan pengusaha kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan kerja melalui Undang-undang Kecelakaan No. 2 tahun 1951 yang perinciannya diatur sebagai berikut :

1. Memberi biaya pengangkutan tenaga kerja yang mendapat kecelakaan ke rumahnya atau ke rumah sakit. Tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dapat secara cuma-cuma memperoleh ganti rugi tersebut.
2. Memberi biaya pengobatan dan perawatan tenaga kerja yang mendapat kecelakaan, termasuk biaya pemberian obat-obatan dan alat-alat pembalut sejak terjadi kecelakaan sampai berakhirnya keadaan sementara tidak mampu bekerja. Biaya ini ditanggung seluruhnya oleh perusahaan.
3. Biaya untuk mengubur tenaga kerja yang meninggal dunia karena kecelakaan, mula-mula ditetapkan sebesar Rp 30.000 , - yang kemudian meningkat terus sesuai dengan perkembangan pengaturan perundangan.

4. Tunjangan sementara tidak mampu bekerja karena sakit. Besarnya tunjangan selama tidak mampu bekerja 120 (seratus dua puluh) hari = 100% dari upah, selanjutnya = 50% dari upahnya.
5. Tunjangan selama-lamanya tidak mampu bekerja sama sekali karena cacat badan yang berat. Keadaan selama-lamanya tidak mampu bekerja sama sekali didapat oleh tenaga kerja yang mendapat kecelakaan, bila tenaga kerja tersebut sekali-kali tidak lagi mengerjakan pekerjaannya yang biasanya dikerjakan dengan mene rima upah. Besarnya tunjangan pada tenaga kerja dalam keadaan demikian = 50% dari upahnya per hari. Jika keadaan demikian menyebabkan ia terus menerus ditolong orang lain maka tunjangannya akan ditambah menjadi 70% dari upahnya perhari.
6. Tunjangan selama-lamanya tidak mampu bekerja karena cacat badan ringan. Dalam hal ini besarnya ganti rugi akan disesuaikan besarnya dengan macam anggota badan yang hilang akibat kecelakaan.
7. Tunjangan pada ahli waris tenaga kerja bila tenaga kerja tersebut meninggal dunia dalam kecelakaan kerja. Tunjangan ini akan diberikan pada janda atau janda-jandanya yang nafkah hidupnya dicarikan tenaga kerja tersebut. Juga dapat diberikan pada anak sah atau yang disahkan yang berumur di bawah 16 tahun, belum menikah. Dapat diberikan pada Bapak dan Ibunya, pada cucu-cucunya yang sudah tidak berorang tua lagi pada amertua laki-laki dan perempuan yang nafkah hidupnya diwarikan oleh tenaga kerja yang mendapat kecelakaan. Apabila ahli waris tersebut ada semua, maka yang akan memperoleh dulu adalah urutan yang ditetapkan terdahulu (janda dan anak-anak) dan maksimal besarnya = 60%.

Pemberian ganti rugi yang diatur melalui U.U. Kecelakaan No 2 tahun 1951 tersebut di atas pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Oleh karena itu melalui Asuransi Sosial Tenaga Kerja, kepada setiap perusahaan diwajibkan

kan mengikutkan tenaga kerjanya pada program-program Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

Perlindungan dari dua peraturan perundangan tersebut bersifat represif atau memberi kompensasi/ganti rugi terhadap kecelakaan dalam hubungan kerja. Dengan perkembangan kemajuan teknik dan teknologi, memungkinkan perusahaan menggunakan mesin-mesin peralatan dan instalasi yang serba canggih, bahan-bahan, cara-cara dan proses produksi dapat meningkatkan resiko tertimpa kecelakaan.

Guna mengantisipasi resiko-resiko tersebut, serta menghindari dan mengurangi akibat-akibat yang fatal, baik terhadap tenaga kerja maupun terhadap masyarakat, telah di undangkan Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang ini mempunyai sasaran preventif atau pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian sejak tahun 1984 telah diupayakan untuk memasyarakatkan arti pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 13/MEN / 1984 ditetapkan pola Kampanye Keselamatan Kerja dan Kesehatan. Dengan meningkatnya pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja yang sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia yang telah memasuki Pelita V, di mana bangsa Indonesia mempersiapkan diri untuk memasuki proses tinggal landas pada Pelita VI.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Kampanye Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut diperlukan adanya pengertian, kesadaran penghayatan, kemampuan serta disiplin dari pengusaha, tenaga kerja, dan anggota masyarakat lainnya, sehingga dapat mencegah setidak-tidaknya mengurangi jumlah terjadinya kecelakaan termasuk peledakan, kebakaran, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, Maka Keselamatan dan Kesehatan kerja perlu dikembangkan pada seluruh kehidu

pan pengusaha, tenaga kerja dan segenap masyarakat sebagai budaya bangsa secara menyeluruh.

b. Upaya Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja.

Seperti yang telah diutarakan di atas bahwa dalam praktek ternyata penyebab kecelakaan kerja sebagian besar ditimbulkan oleh faktor manusia. Pada dasarnya kecelakaan kerja dapat dicegah dan dihindari.

Kecelakaan kerja dapat dicegah dengan cara :

1. Peraturan Perundangan

Melalui ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan, dan pemeliharaan, pengawasan, pengujian, tugas pengusaha dan buruh, latihan, supervisi medis, pemeriksaan kesehatan. Peraturan Perundangan tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, dan dari Peraturan Pemerintah tersebut perlu dibuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sehingga penerapan peraturan perundangan akan memadai untuk perkembangan teknik dan teknologi.

2. Standarisasi, yaitu penerapan standar-standar resmi, setengah resmi, atau tak resmi mengenai misalnya konstruksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan, jenis-jenis peralatan industri tertentu, praktek-praktek keselamatan dan higiene umum dan alat-alat perlindungan diri. Jadi perusahaan yang mengoperasionalkan usahanya apalagi dengan menggunakan teknologi tinggi, harus memperhitungkan dampak teknologi tersebut sejak awal perencanaan (disain teknologi) yang memungkinkan resiko kecelakaan kerja sekecil mungkin. Perlu dipersiapkan pula sarana pencegahan kecelakaan kerja dan mendidik pelaksana operasional agar dapat memperoleh keahlian dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat yang tersedia.

3. Pengawasan, yaitu pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan ketentuan perundang-undangan yang diwajibkan. Pengawasan

ini memegang peranan penting, karena semakin tinggi tingkat teknologi yang digunakan semakin tinggi pula pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Selain itu teknologi yang makin tinggi dapat menimbulkan kemungkinan bahaya yang lebih besar, sehingga memerlukan teknik pengendalian untuk mengurangi dampak negatif terhadap tenaga kerja, masyarakat dan lingkungannya.

4. Penelitian yang bersifat teknik, yang meliputi sifat dan ciri-ciri bahan-bahan yang berbahaya, penyelidikan tentang pagar cengaman, pengujian alat-alat perlindungan diri, penelitian tentang pencegahan peledakan gas dan debu atau penelitian tentang bahan-bahan dan desain paling tepat untuk tambang-tambang pengangkat dan peralatan pengangkat lainnya. Penelitian tersebut penting untuk menunjang produksi dan produktifitas kerja.
5. Riset medis, yang meliputi penelitian tentang efek-efek fisiologis dan patologis dan keadaan-keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan. Mengupayakan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja sebenarnya tidak terbatas pada saat para pekerja menjalankan tugasnya ditempat kerja mereka. Para pekerja akan terbina kesehatannya, bila ia mampu mencukupi kebutuhannya yang esensial yakni pangan, sandang, papan yang memenuhi persyaratan kesehatan. Keselamatan kerja tetap terancam, bila kondisi kesehatan para pekerja tidak memadai, walaupun lingkungan serta sarana kerja sudah baik pengetahuan serta kemampuan mereka dalam menggunakan sarana-sarana kerja sudah tidak disangsikan lagi. Karena kesehatan yang tidak baik, bisa jadi tenaga kerja tiba-tiba pingsan sewaktu menjalankan pekerjaan. Akibatnya ia akan dimangsa mesin yang sedang berputar dengan kecepatan tinggi. Inilah sebabnya pengusaha harus memberi kesejahteraan pada pekerjanya. Pekerja yang sejahtera tentu akan bekerja produktif, karena itu merupakan keharusan pada pengusaha

untuk mengupayakan kesehatan dan keselamatan tenaga kerjanya.

6. Penelitian psikologis, yaitu penyelidikan tentang pola-pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Penelitian dibidang ini jua penting, sebab efek kejiwaan yang dibawa oleh pekerja dari rumah ke tempat pekerjaannya dapat juga mengakibatkan kurangnya gairah kerja. Kurangnya gairah kerja juga dapat disebabkan ia tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya, maka perlu sekali ada pendekatan dari hati ke hati antara pengusaha dan pekerjanya.
7. Penelitian secara statistik, untuk menetapkan jenis-jenis kecelakaan yang terjadi, banyaknya, mengenai siapa saja, dalam pekerjaan apa dan apa sebab-sebabnya. Penelitian semacam ini merupakan sumber data banyaknya kecelakaan, dan dengan data tersebut pengusaha dapat mempelajari, mengatasi dan, mengurangi kejadian-kejadian yang dapat merugikan produktivitas kerja dan usaha.
8. Pendidikan yang menyangkut pendidikan keselamatan dalam kurikulum teknik, sekolah-sekolah perniagaan atau kursus-kursus pertukangan. Pendidikan apapun jenisnya merupakan faktor penunjang produktivitas kerja dan usaha, karena dengan pendidikan, tenaga kerja menjadi ahli, trampil dalam melakukan pekerjaan. Apalagi bila perusahaan menggunakan teknologi canggih, akan menuntut penggunaan tenaga kerja yang dapat mengoperasikan peralatan canggih tersebut tanpa menimbulkan kecelakaan kerja.
9. Latihan-latihan yaitu latihan teknik praktek bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang baru dalam keselamatan kerja. Latihan tersebut diperlukan agar supaya tenaga kerja mengetahui, memahami pekerjaan yang akan diserahkan padanya. Dari pemahaman timbullah pengetahuan agar aman dan selamat dalam menjalankan pekerjaan.
10. Penggairahan, yaitu penggunaan aneka cara penyuluhan atau

pendekatan lain untuk menimbulkan sikap untuk selamat. Sikap untuk selamat ini diperlukan tidak hanya bagi diri pekerja sendiri tetapi juga untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekelilingnya.

11. Asuransi, yaitu insentif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan. Peranan perusahaan asuransi adalah menetapkan besarnya premi bila ada kecelakaan kerja. Tak kurang pentingnya adalah peranan bank sebagai pendukung dana dalam upaya pencegahan dan penang gulangan kecelakaan kerja.
12. Usaha keselamatan pada tingkat perusahaan. Usaha ini dilakukan dengan membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3) sebagai wadah guna meningkatkan partisipasi aktif pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan secara aman, sehat dan selamat. Peranan P2K3 inilah menentukan ukuran utama efektif dan tidaknya penerapan keselamatan kerja di perusahaan. Disamping itu tumbuh juga bentuk partisipasi masyarakat dalam Bina Lingkungan Industri (BILI), yang merupakan forum komunikasi dan informasi antara industri dan masyarakat dalam menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja.³⁾

Dari upaya-upaya pencegahan kecelakaan seperti tersebut di atas sangat diperlukan adanya kerja sama dari berbagai keahlian seperti pembuat Undang-Undang, pegawai pemerintah, ahli-ahli teknik, dokter, ahli ilmu jiwa, ahli ilmu statistik, guru guru, pengusaha dan tenaga kerja.

III. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kecelakaan dalam hubungan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan serta merupakan resiko sosial yang bisa dialami setiap tenaga kerja di tempat kerja

3) Ibid, hal 54.

2. Akibat kecelakaan tersebut dapat mendatangkan kerugian dari segi ekonomi dan sosial yang bisa menghambat produktivitas kerja.
3. Oleh karena itu kepada penderita kecelakaan kerja perlu diberi perlindungan yang diharapkan atau disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.
4. Perlindungan tenaga kerja yang diberikan pemerintah bersumber dari Undang-Undang No 1 tahun 1970 yang mempunyai sasaran pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan Undang-Undang No 2 tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1977 yang mempunyai sasaran kompensasi dalam kecelakaan dalam hubungan kerja.
5. Sejak tahun 1984 perlindungan dengan Undang-Undang No 1 tahun 1970 lebih diintensifkan dengan menerapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 13 tahun 1984, di mana untuk setiap tahun diadakan Kampanye Nasional Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
6. Usaha Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tingkat perusahaan diadakan dengan cara membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai wadah meningkatkan partisipasi aktif pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan secara aman, sehat dan selamat. Sedangkan partisipasi masyarakat diwujudkan dengan terbentuknya Bina Lingkungan Industri yang merupakan forum komunikasi dan informasi antara industri dan masyarakat dalam menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Tugas dari Panitia Pembina Keselamatan Kerja di perusahaan adalah mewujudkan pelaksanaan Kampanye Nasional Keselamatan dan Kesehatan kerja yakni mewujudkan terciptanya masyarakat dan lingkungan kerja yang aman sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan termasuk kebakaran dan peledakan, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Suma'mur, Dr, M.Sc - Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, Gunung Agung, Jakarta, 1981.
2. Suma'mur, Dr, MSc - Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja Gunung Agung, Jakarta, 1980.
3. Salim Emil, Prof, Dr - Management Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Yayasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jakarta, 1983.
4. Soekarno, Drs, MPA - Pemasyarakatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Penanggulangan Kebakaran, Jakarta, 1983.
5. Harian Kompas, 20 Agustus 1988.
6. Majalah Masalah-Masalah Hukum, tahun 1990.